

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**TRIWULAN I
PERIODE JANUARI - MARET 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN II PERIODE JANUARI - MARET 2022
DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada Hari Rabu, 31 Maret 2022


 Ketua Tim Survei,



WARNO, S.H.
NIP. 19670904 199103 1 002

Megetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,




SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil responden	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	21
BAB IV	22
PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Rekomendasi	22
4.3. Tindak Lanjut Atas Unsur Dengan Nilai Terendah	23
LAMPIRAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi Sisuper. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dari 01 Januari – 31 Maret 2022 dan diperoleh 114 responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggungjawab survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan

mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

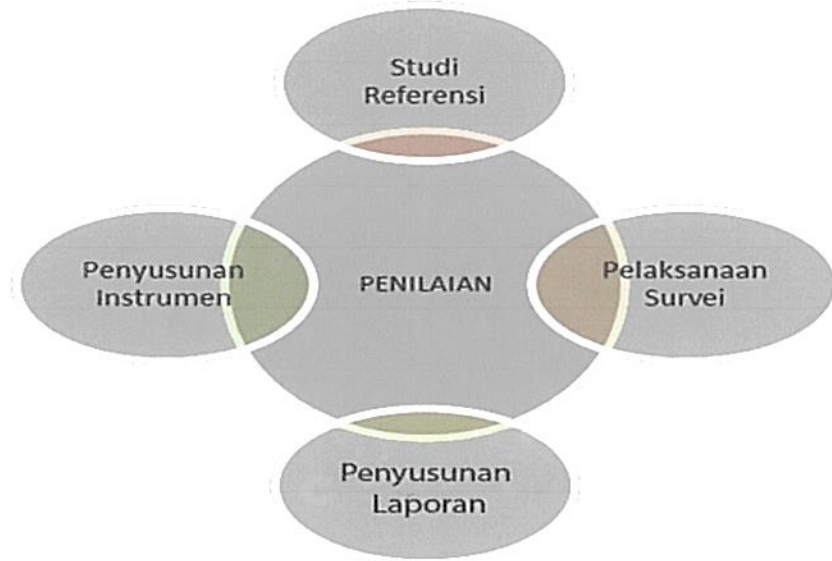
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB II INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

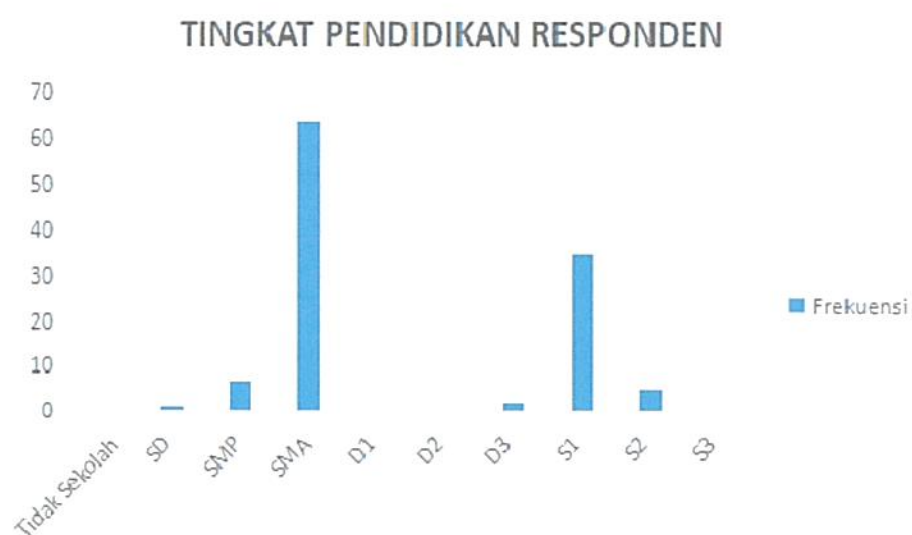
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar SMA sebanyak 64 (56,14%) responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	0,88
3	SMP	7	6,14
4	SMA	64	56,14
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	2	1,75
8	S1	35	30,71
9	S2	5	4,38
10	S3	0	0
JUMLAH		114	100

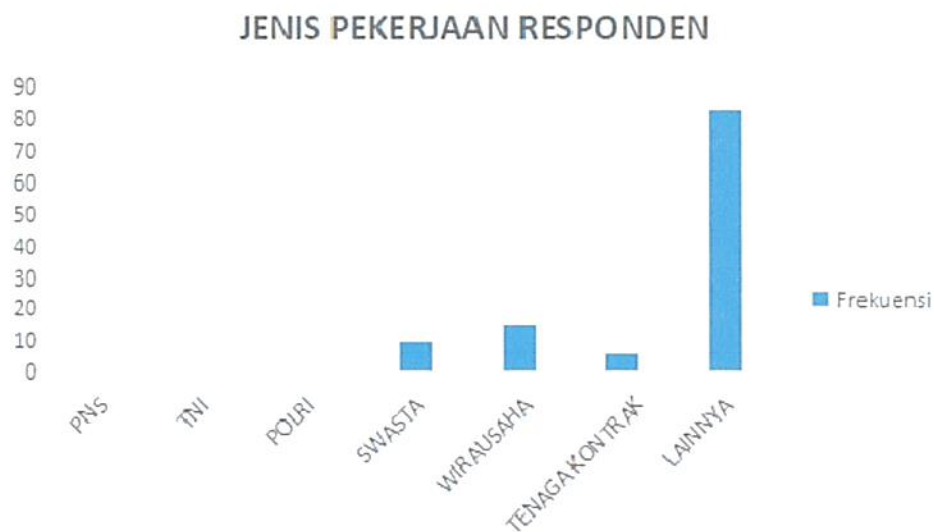


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 83 (72,81%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	0	0
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	SWASTA	10	8,77
5	WIRAUSAHA	15	13,16
6	TENAGA KONTRAK	6	5,26
7	LAINNYA	83	72,81
JUMLAH		114	100



3.1.3. Jenis Kelamin

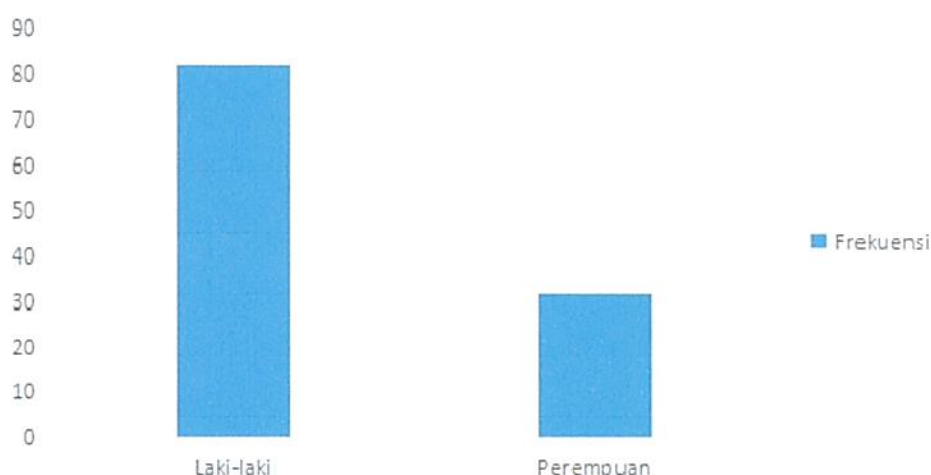
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 82 (71,93%) responden.

Tabel 6

Jenis Kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	82	71,93
2	Perempuan	32	28,07
JUMLAH		114	100

JENIS KELAMIN RESPONDEN



3.1.4. Kelompok usia responden

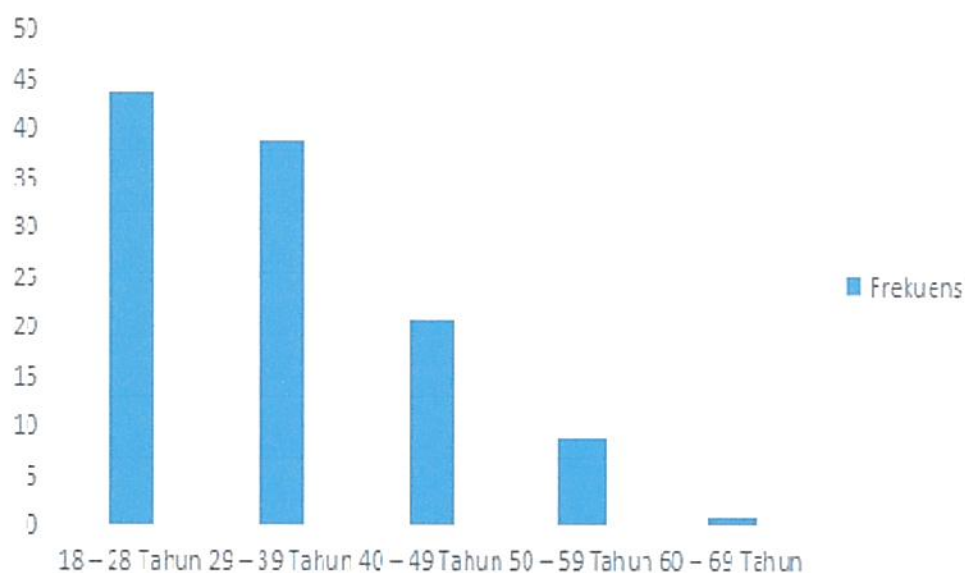
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dengan jumlah 44 (38,6%) responden.

Tabel 7.

USIA RESPONDEN

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	18 – 28 Tahun	44	38,6
2.	29 – 39 Tahun	39	34,21
3.	40 – 49 Tahun	21	18,42
4.	50 – 59 Tahun	9	7,89
5.	60 – 69 Tahun	1	0,88
Jumlah		114	100

USIA RESPONDEN



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “114 (100%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu Sesuai Prosedur (A)” pada index rata – rata skor sebesar “4,00” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 8.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	114	100
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	0	0
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR MANIPULASI PERATURAN



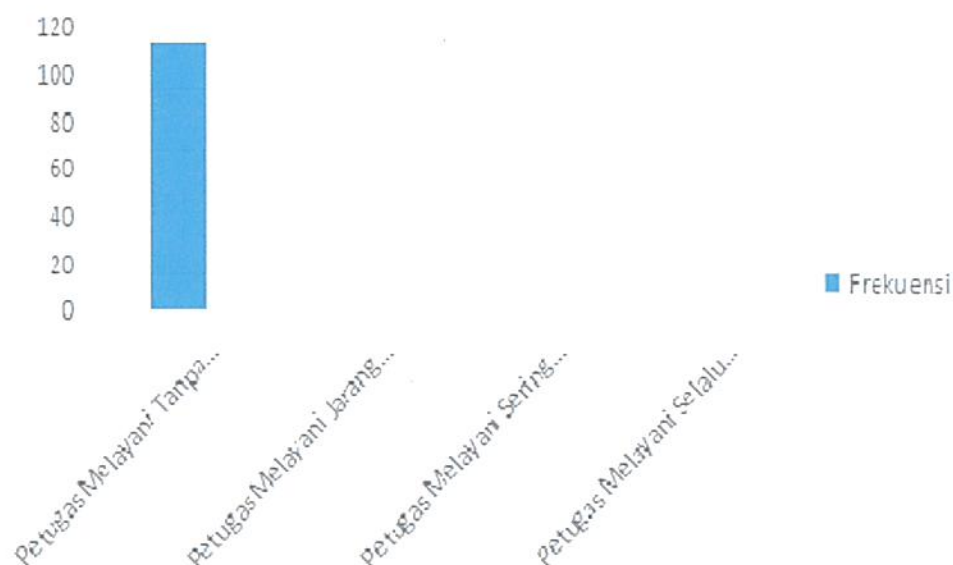
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“114 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4.00”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	114	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR PENYALAHGUNAAN JABATAN



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

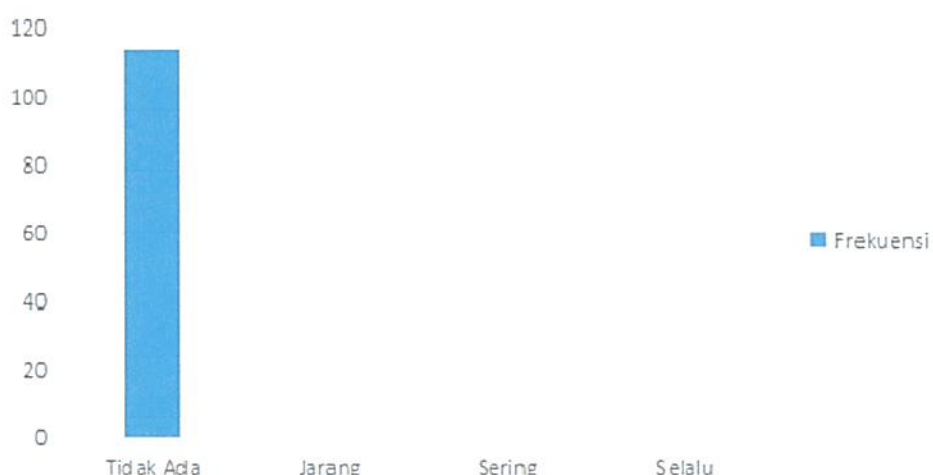
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan “114 (100%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Ada (A)” pada index rata – rata skor sebesar “4.00” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	114	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR MENJUAL PENGARUH



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

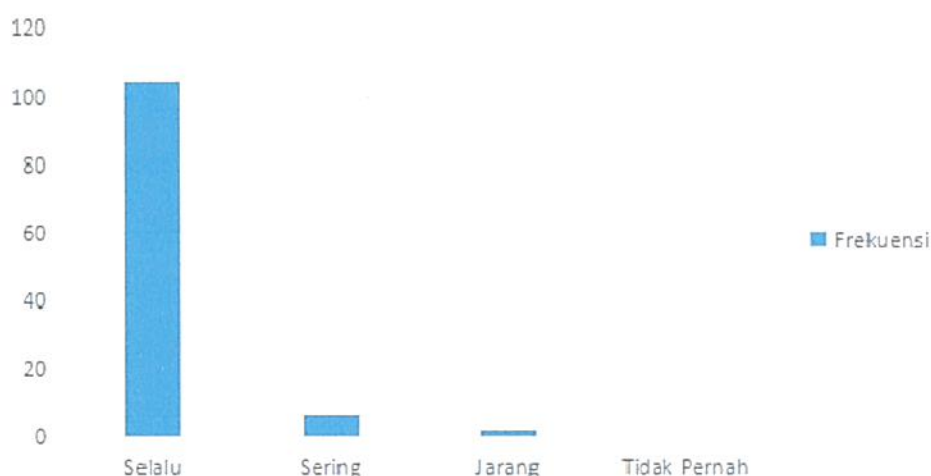
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “105 (92,11%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,904” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	105	92,11
2	Sering	B	3	7	6,14
3	Jarang	C	2	2	1,75
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR TRANSAKSI BIAYA



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

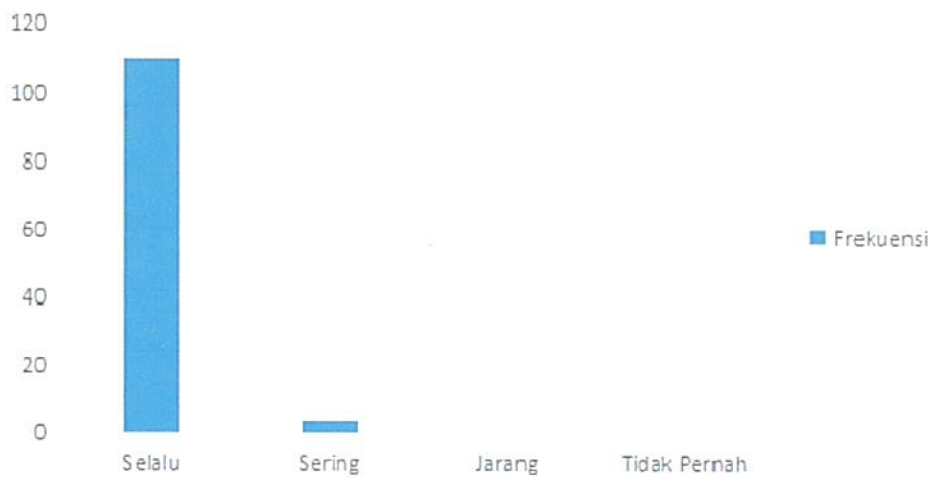
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**110 (96,5%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**3,965**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Sangat Baik**”.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	110	96,5
2	Sering	B	3	4	3,5
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR BIAYA TAMBAHAN



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“110 (96,5%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,965”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	110	96,5
2	Jarang	B	3	4	3,5
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR HADIAH



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

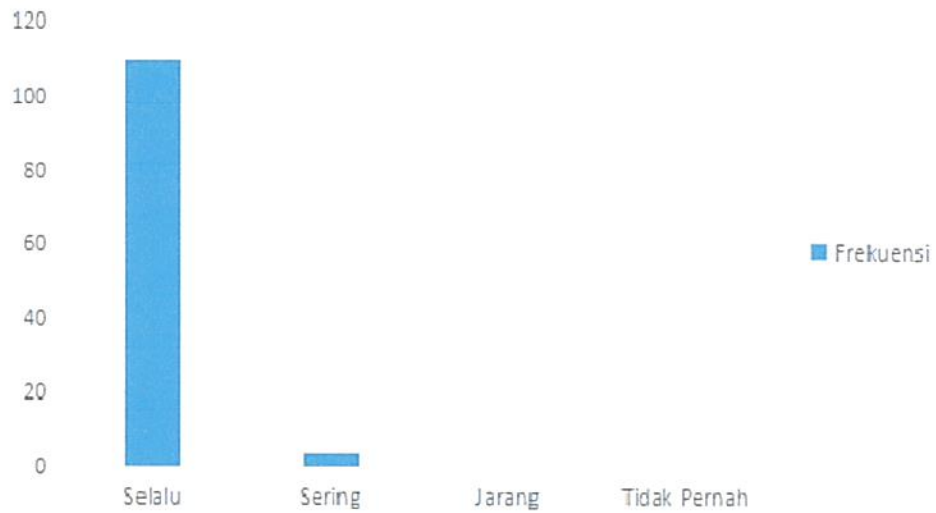
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “110 (96,5%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,965” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	110	96,5
2	Sering	B	3	4	3,5
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR TRANSPARANSI BIAYA



3.2.8. Indikator Percaloan

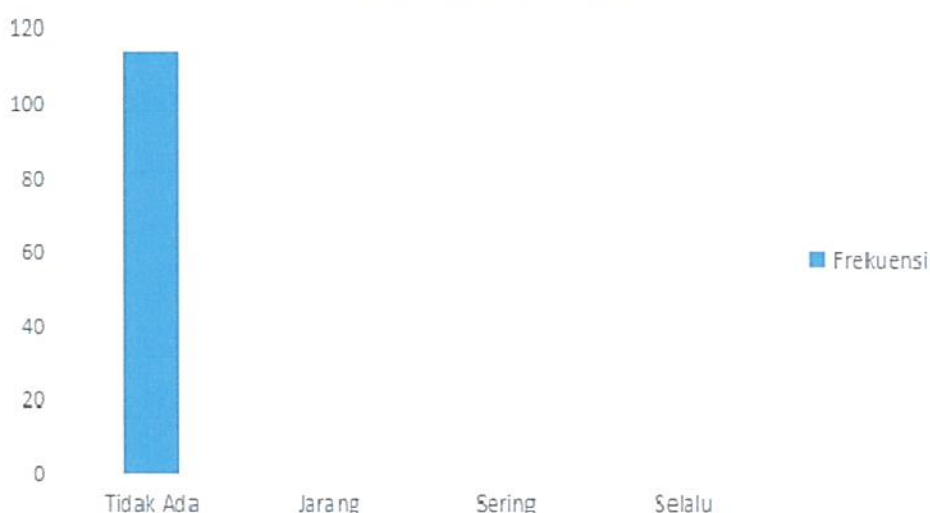
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“114 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4.00”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	114	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR PERCALOAN



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“114 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4.00”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	114	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR PERBUATAN CURANG



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“114 (100%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“4.00”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	114	100
2	Jarang	B	3	0	0
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
JUMLAH				114	100

INDIKATOR TRANSAKSI RAHASIA



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar “99,50”.

Tabel 18.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA – RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	4,00	0,4	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan	4,00	0,4	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	4,00	0,4	Sangat Baik
4	Transaksi Biaya	3,904	0,39	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	3,965	0,396	Sangat Baik
6	Hadiah	3,965	0,396	Sangat Baik
7	Transparansi Biaya	3,965	0,396	Sangat Baik
8	Percaloan	4,00	0,4	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,00	0,4	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,00	0,4	Sangat Baik
Jumlah Skor Rata – Rata Tertimbang			3.98	
IPK			99.50	

Indeks “99,50” tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit

pelayanan “**SANGAT BAIK**”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka “**81.26 – 100.00**”

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	-

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi “99,50” atau “3,98” dan masuk pada kategori “Sangat Baik”

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,904 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,965 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode Triwulan I Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun

dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya, Biaya Tambahan** dan **Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

4.3. Tindak Lanjut Atas Unsur Dengan Nilai Terendah

Berdasarkan analisa terhadap data kuisisioner Persepsi Korupsi dan telah diketahui sebagaimana di atas, unsur yang mendapatkan penilaian terendah indikator **Transaksi Biaya, Biaya Tambahan** dan **Hadiah**.

Adapun tindak lanjut atas hasil survei khususnya nilai terendah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- Memasang Banner standar pelayanan di ruang PTSP yang didalamnya memuat biaya dari setiap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menciptakan transparansi dalam berperkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengupload biaya perkara pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan juga meletakkan besaran panjar biaya perkara tersebut pada ruang pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan pelayanan tidak pernah meminta biaya apapun selain tarif resmi yang ditentukan dan selalu memberikan kuitansi sesuai tarif resmi pada setiap transaksi yang dilakukan di bagian pelayanan.
- Memasang stiker anti gratifikasi di setiap komputer pelayanan.
- Memutar audio himbauan anti gratifikasi setiap 2 (dua) jam sekali di ruang PTSP dan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan untuk tidak memberikan apapun selain biaya yang telah ditentukan di setiap pelayanan.

LAMPIRAN

TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Logout

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard Responden

si SUPER
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Survei Persepsi ARIK Kompol SPAK Klik Disini

Survei Kepuasan Masyarakat SKM Klik Disini

Survei Harian SH Klik Disini

Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 3.2256, Penggunaan Memori : 1.14MB

FORM DATA RESPONDEN

Survei Persepsi ARIK Kompol - SPAK

Form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

Layanan

Form Kuisioner

Kesan & pesan

Data Responden SPAK

Nama

Umur / Jenis Kelamin

Nomor HP

Domisili

Pendidikan

Pekerjaan

FORM KUESIONER

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
- Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada

FORM LAYANAN

Data Responden
Nama serta detail responden

2 Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SKM

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan * ▼

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? * ▼

FORM KESAN & PESAN

Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

4 Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
Klik Kotak dibawah "Saya bukan robot" sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot



Simpan Data

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,50 %

Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

JUMLAH	114 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 82 ORANG	
	PEREMPUAN : 32 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 7 ORG	S1 : 35 ORG
	SMU : 64 ORG	S2 : 5 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 0 ORG	SWASTA : 10 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRAUSAHA : 15 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 6 ORG
	LAINNYA : 83 ORG	

DATA UMUR RESPONDEN IPAK TRIWULAN I DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi			Jumlah (Orang)	% (Persen)	
18 - 28 Th			44	38,60	
29 - 39 Th			39	34,21	
40 - 49 Th			21	18,42	
50 - 59 Th			9	7,89	
60 - 69 Th			1	0,88	
Total			114		

KORUPSI PERSEPSI

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN I DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur							
Deskripsi		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah		456	456	456	445	452	452	452	456	456	456	
NRR Per RL		4,000	4,000	4,000	3,904	3,965	3,965	3,965	4,000	4,000	4,000	39,798
NRR Tertimbang		0,400	0,400	0,400	0,390	0,396	0,396	0,396	0,400	0,400	0,400	3,980
IPAK Unit Pelayanan											3,98	

TIGA UNSUR TERENDAH

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	445
2	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	452
3	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	452

TIGA UNSUR TERTINGGI

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	456
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	456
3	Pemahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	456